



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARTAWUN
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 151008

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/252 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 3360 m2 di PULANG PISAU, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 24700 m2 di PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di PULANG PISAU, WARISAN Rp. 20.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 149.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 22.055.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 152.075.436

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.063.130.436



III. HUTANG

Rp.

256.451.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

806.678.636

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.